

ANALISIS PERENCANAAN REVITALISASI INFRASTRUKTUR DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MANADO

STEWART BRADLY NGANTUNG

MASJE S. PANGKEY

HELLY F. KOLONDAM

bradlyngantung13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui suatu perencanaan infrastruktur khususnya pada revitalisasi drainase yang berlokasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. Analisis ini menggunakan penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas, seluruh kabid di bidangnya masing-masing, dan sebagian pegawai dan tenaga kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. Pengumpulan informasi menggunakan teknik observasi, wawancara dan penelusuran dokumen. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan suatu perencanaan infrastruktur revitalisasi drainase dengan menggunakan 4 indikator yaitu: (1). Diagnosis masalah, meskipun menunjukkan perkembangan yang pesat, namun kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Manado masih perlu ditingkatkan dari segi pemerataan, efisiensi dan estetika. (2). Perumusan tujuan, kebutuhan masyarakat Kota Manado terhadap infrastruktur dasar yang memadai relatif tinggi tetapi kondisi drainase eksisting yang sebagian besar dalam kondisi yang kurang baik, (3). Analisis kelayakan, pembangunan infrastruktur telah tepat sasaran dan direncanakan sejalan dengan perencanaan penggunaan lahan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, namun pemerintah daerah belum mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sesuai aturan yang berlaku, (4). Evaluasi, statistik berkaitan dengan pengevaluasian dalam bentuk pengolahan data statistik yang dibutuhkan seperti data-data capaian indikator, hal ini juga dipakai untuk memproyeksikan target-target pembangunan yang hendak dicapai pada akhir periode masa kepala daerah.

Kata Kunci: Perencanaan, Infrastruktur, Drainase

ABSTRAC

This research is to find out infrastructure planning especially on drainage revitalization at the Manado City Public Works and Spatial Planning Office. This research aims to find out how far the drainage revitalization planning issued by the Public Works and Spatial Planning Office is qualitative research. The informants in this research are the Head of Department, all heads of division in their respective fields, and all employees at the Manado City Public Works and Spatial Planning Office. Data collection used observation, interview, and documentation techniques. Data analysis in this research uses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research show a drainage revitalization infrastructure planning using 4 indicators, namely: (1) Problem diagnosis, although it shows rapid development, the quality of infrastructure development in Manado City still needs to be improved in terms of equity, efficiency and aesthetics. (2) Formulation of objectives, the needs of the people of Manado City for adequate basic infrastructure are relatively high but the existing drainage conditions are mostly in poor condition,. (3) Feasibility analysis, directed and planned infrastructure development in accordance with spatial plans in the concept of sustainable development but the local government has not been able to carry out its roles and functions properly according to applicable regulations. (4) Evaluation, statistics related to evaluation in the form of managing the required statistical data such as data on indicator achievements, this is also used to project development targets to be achieved at the end of the period of the regional head.

Keywords: Planning, Infrastructure, Drainage

PENDAHULUAN

Agar bisa mewujudkan impian dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu masyarakat yang sebanding dan sejahtera diperlukan berbagai upaya untuk menyelenggarakan infrastruktur yang berdampak pada kesamarataan dan kebebasan untuk hidup sehat dan mandiri, dan berkeadilan. Pada perkembangannya, infrastruktur merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara, infrastruktur dapat diartikan sebagai modal dalam upaya meningkatkan produktivitas perekonomian negara dan juga meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat. Tentunya dengan mengembangkan sektor infrastruktur, harapannya masyarakat dapat hidup lebih produktif dalam hidupnya.

Infrastruktur merupakan ruang-ruang yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan berperan penting dalam menunjang kesatuan ekonomi, sosial budaya dan mengikat. Pembangunan infrastruktur memainkan peran kunci dalam realisasi hak asasi manusia seperti pangan, sandang, perumahan, layanan kesehatan, pendidikan dan hak-hak lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Rencana Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004, pimpinan kementerian/lembaga menetapkan dari Rencana Pembangunan Strategis Jangka Menengah merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024 yang disusun berdasarkan keputusan presiden Nomor 18 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai standar pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dalam ancang-ancang, penyusunan program, penilaian, pelaksanaan, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengawasan, untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang masyarakat secara terpadu, efisien dan dapat dipercaya

untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan infrastruktur, melanjutkan pengembangan kawasan produksi yang memiliki hotspot dan mempercepat pertumbuhan nilai tambah perekonomian masyarakat.

Untuk mencapai keberlanjutan diperlukan keselarasan antara tiga (3) dasar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang kemudian berpengaruh dengan dimensi konvensional. penerapan keberlanjutan biasanya tergambar dalam parameter yang meliputi: (1) indikator makroekonomi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan imbas ekonomi; (2) tingkat keterlibatan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan, keikutsertaan masyarakat kelompok marginal, dampaknya terhadap wujud sosial masyarakat dan organisasi atau nilai-nilai sosial yang muncul dalam masyarakat; dan (3) pengaruh akan kualitas air, udara dan tanah serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

Selanjutnya dalam mencapai tujuan sebagaimana dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diatas kemudian diuraikan secara lebih jelas dan mendetail terhadap kondisi daerah agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan di daerah maka Pemerintah Daerah secara turunan peraturan perundang-undangan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi acuan perencanaan kawasan untuk kurun waktu lima (5) tahun. Strategi pengembangan infrastruktur dijelaskan bahwa sasaran maupun masalah yang menjadi fokus antara pemerintah pusat dan daerah yakni perencanaan pembangunan yang dimana kondisi harus patut dicermati atau disodorkan menimbang bahwa rumusan pembangunan memiliki dampak yang bermakna bagi daerah

dalam memastikan fokus penanganan pemerintah daerah kelak nanti

Seiring dengan perkembangannya Tahun 2014 pencapaian akses penduduk terhadap pembangunan infrastruktur berdasarkan data hasil Riskesdas, Kementerian Kesehatan, pada tahun 2014 akses masyarakat terhadap saluran drainase hanya sebesar 57,90%, angka tersebut menunjukkan nilai yang rendah dibandingkan akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah, sebagaimana data menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah mencapai 61,06%, dan manajemen sampah sudah menghasilkan sekitar 86,73%.

Hal ini juga diperkuat dengan data sebagaimana yang disampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Manado, bahwa Kota Manado memiliki kawasan seluas 5.149 Ha yang termasuk dalam kawasan rawan banjir tinggi, kawasan tersebut tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado, kawasan rawan banjir tertinggi sebagian besar terletak di kawasan bantaran sungai, data terbaru terjadi pada tahun 2020 yang dimana banjir dengan luas kawasan terdampak yaitu 58,83 Ha dengan jumlah keluarga terdampak yaitu dengan 853 Kartu Keluarga (KK) serta di Tahun 2021 terjadi dimana banjir dengan luas kawasan terdampak yaitu 377,87 Ha

Sebagaimana permasalahan diatas, indikasi rendahnya akses masyarakat terhadap drainase juga tercermin dari tingginya tingkat perkembangan perumahan dan kawasan permukiman yang sangat pesat daerah yang berdampak pada permasalahan banjir dari di Kota Manado. Hal tersebut ditunjang dengan data hasil observasi dilapangan yang menunjukkan beberapa jumlah lokasi titik banjir dengan luas 572 ha, berdasarkan peta potensi rawan banjir.

Berdasarkan hasil pemantuan peneliti dilapangan, diketahui bahwa masih belum optimalnya perencanaan pembangunan infrastruktur drainase dan saluran, terindikasi dari Kurang optimalnya peran instansi yang bertanggung jawab mengenai urusan pembangunan infrastruktur dimana masih kurangnya pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah saat aktualisasi pelaksanaan perencanaan pembentukan prasarana/infrastruktur pendukung drainase. terbukti, Surat Keputusan Daerah Kota Manado No. 1 perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup pada tahun 2020 sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan konservasi dan pengembangan fungsi lingkungan hidup sedemikian rupa agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan dan peningkatan kehidupan; Namun terdapat indikasi bahwa sosialisasi peraturan tersebut kurang optimal sehingga dampak perencanaan dan penegakan hukum terkait belum berjalan dengan baik.

Rendahnya komitmen pejabat publik dan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur drainase, dimana masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses perencanaannya.

Mencermati fenomena-fenomena di atas, maka perlu dilakukan analisa lebih dalam dan merasakan lebih jelas permasalahan-permasalahan yang muncul. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado mengenai permasalahan yang melatarbelakangi mengenai perencanaan revitalisasi infrastruktur

TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti Terdahulu

1. Christin Deishe Deivan Wuri, Masje Silija Pangkey, Helly Febrina Kolondam (2020). Pengaruh kapasitas peralatan terhadap efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif beserta metode analisis deskriptif dan statistik inferensial regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas peralatan mempunyai ikatan fungsional atau model yang positif dan sangat bermakna serta beraturan dengan efisiensi perencanaan pembangunan daerah
2. Kartika Karina Poluan, Masje Pangkey, Gustaf Tampi (2019). Dampak pembangunan infrastruktur di Desa Pisa, Kecamatan Tombatu, Wilayah Administratif Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah perubahan nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada, perlunya strategi dari pemerintah hingga kelompok kepentingan. Namun pada hakikatnya pembangunan infrastruktur belum terlaksana secara optimal atau tidak memenuhi harapan masyarakat di Desa Pizo, Kecamatan Tombatu, Minahasa bagian tenggara.
3. Yoyo Bulele, M.S. Pangkey, W.Y. Rompas (2015). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Analisa ini memakai penelitian kualitatif dengan uraian mutu. Akhir dalam

penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari beberapa indikator yang memperlihatkan bahwa efektivitas sebuah perencanaan pembangunan di desa dapat dibuktikan pada beberapa indikator. Terdapat kesuksesan ketertiban, keteraturan dan kelancaran) dalam implementasi program pembangunan desa inklusif yang telah diputuskan.

4. Giffried R. Rumpia, Burhandin Kiay, Helly F. Kolondam (2019) Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi : Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara). Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur pada pedesaan Desa Bulude menurut tiga indikator kinerja, dimulai dari kinerja Program Pembangunan Prasarana Perdesaan (PIIP), menurut indikator pencapaian tujuan (2) efisiensi. program pembangunan infrastruktur perdesaan (PIIP) menurut indikator integrasi (3)

Konsep Perencanaan

Perencanaan telah berpindah dari aktivitas naluriah, spontan, dan subjektif berdasarkan pengalaman sebelumnya ke proses yang sistematis dan objektif. Desain yang dibuat dengan baik seringkali kandas karena minimnya perhatian terhadap implementasi. Perencanaan merasa pekerjaannya telah selesai ketika mereka menyiapkan dokumen perencanaan. Perencanaan harus diakui seumpama bagian dari keseluruhan cara yang mencakup penjabaran kebijakan, perumusan rencana, pengelolaan rencana, evaluasi dan observasi.

Pemahaman desain merangkum banyak arti berdasarkan sudut pandang tiap ahli, dan tidak ada deskripsi yang berlaku secara universal. Beberapa batasan desain menurut para ahli adalah sebagai

Serangkaian perencanaan pendapat menurut dari Berry (1993) dalam Yeni, N, A (2019 : 53) meliputi 7 tahap berikut:

1. **Diagnosis masalah**

Perancangan didasarkan pada kurang maksimalnya terhadap kondisi yang ada seperti sesuatu yang sengaja dirancang atau dikembangkan

2. **Perumusan tujuan**

Perumusan tujuan sebenarnya akrab kaitannya sama masalah. Apabila akar isu-isu sudah terdefinisi dengan jelas, maka arah perancangan juga maksima, karena dasarnya tujuannya adalah untuk mengatasi isu-isu tersebut.

3. **Proyeksi dan perkiraan**

Perencanaan sangat mengutamakan pada tujuan ke depan, sehingga sudut pandang pada peramalan ini menjadi penting dalam pengembangan.

4. **Pengembangan alternatif**

Pembangunan alternatif sering kali diabaikan dalam proses perencanaan. Padahal, langkah tersebut dapat mempengaruhi karakter keputusan akhir secara signifikan, bahwasannya ketetapan tersebut harus diambil dari beberapa opsi dalam rencana.

5. **Analisis kelayakan**

Analisis kelayakan menanyakan persoalan tentang setiap opsi yang dikembangkan. Hambatan terhadap implementasi sebenarnya mudah untuk diidentifikasi jika hambatan tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya

6. **Evaluasi**

Bagian evaluasi dimulai pada waktu rancangan mempunyai beberapa pilihan yang diharapkan dapat dilaksanakan, jika hanya ada satu pilihan maka harus diambil keputusan “ya atau tidak”, yaitu apakah akan menerapkan serangkaian tindakan yang direncanakan atau tidak.

7. **Pelaksanaan (implementasi)**

Suatu Komitmen politik yang kuat nampaknya merupakan syarat yang diperlukan, meski belum tentu cukup. Sasaran yang terdefinisi dengan jelas dan dapat diubah menjadi sasaran yang dapat ditindaklanjuti adalah hal yang penting

Perencanaan adalah inti dari manajemen karena seluruh kegiatan manajemen itu diatur dan dikendalikan oleh rencana. Perencanaan membolehkan pengambil ketentuan atau manajer, untuk memakai sumber daya mereka secara efektif dan efisien

Konsep Drainase

Drainase berasal dari kata: *Dry* yang artinya kering. Drainase didefinisikan fasilitas infrastruktur yang dibangun untuk membersihkan kelebihan air di bawah permukaan tanah pada suatu wilayah (Hasmar, 2004). Oleh karena itu, Drainase adalah suatu sistem pembuangan yang tujuannya untuk mengalirkan air, mencegah banjir, mencegah penyakit, dan berfungsi sebagai saluran pembuangan air limbah. Berbagai bentuk desain sistem drainase

Konsep perencanaan drainase perkotaan di Indonesia banyak menggunakan prinsip-prinsip dengan metode paradigma lama atau tradisional dengan zonasi, yang menekankan agar limpasan air hujan suatu wilayah dapat dialirkan ke sistem drainase perkotaan atau terdekat secepatnya. badan air penerima

Dalam perencanaannya, konsep drainase ekologis memerlukan perencanaan sumber daya yang matang, sehingga alokasi perencanaan sumber daya terfokus pada pembangunan dan pengelolaan, serta pada sejauh mana infrastruktur dapat memenuhi kebutuhan air (Speed et al.,2013). Oleh karena itu diperlukan infrastruktur ekologi, agar ekologi tidak dirugikan

Konsep Infrastruktur

Infrastruktur berasal dari bahasa Perancis *infra* yang artinya kawasan, dan *struc* yang berpatok pada kesepakatan tentang ikatan antar bagian atau elemen dari sesuatu yang kompleks. Infrastruktur adalah seluruh prasarana struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun non fisik, yang memenuhi kebutuhan dasar sosial dan ekonomi suatu masyarakat (Catlina Cantu, 2017)

Infrastruktur merupakan sistem yang mampu segala perbidangan sosial dan ekonomi, yang mencakup menjadi konjungsi dengan sistem, hal ini dapat dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan. Prasetyo dan Firdaus (2009 : 225-226), membagi infrastruktur menjadi 3 yaitu menurut The World Bank (1994):

1. Infrastruktur adalah suatu bentuk modal publik dalam perekonomian, yang terdiri dari investasi publik pada jalan umum, jembatan, sistem pembuangan limbah, dan lain-lain. (Gregory Mankiw)
2. Infrastruktur adalah suatu sistem fisik yang menyediakan drainase, irigasi, transportasi, bangunan, dan utilitas umum lainnya yang diperlukan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan dasar berbagai versi masyarakat, baik sosial maupun ekonomi. (Gregory Mankiw)
3. Infrastruktur adalah suatu sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung

sistem lingkungan, di mana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan (Robert)

Dalam teori Todaro (2000), kehidupan masyarakat diciptakan atau ditingkatkan melalui pembangunan, yaitu eksploitasi hasil-hasil pembangunan fisik, yaitu pembangunan atau peningkatan prasarana jalan. Dengan dibangunnya infrastruktur jalan, masyarakat beroleh memanfaatkan jalan untuk berbagai kebutuhan seperti pergerakan, penjualan hasil pertanian, kemudahan pengangkutan hasil dan peralatan pertanian.

Konsep Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan seringkali dibingkai sebagai sebuah proses dimana para perencana mengubah situasi nasional ke situasi lain yang dianggap lebih unggul (Katz dalam Tjokrowinoto, 1987: 3). Pembangunan infrastruktur telah diidentifikasi sebagai bidang prioritas pembangunan nasional untuk mendukung prioritas swasembada pangan, energi, navigasi, pariwisata dan industri (Dwi Supatmi, 2016).

Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting sebagai penggerak pembangunan karena sangat menentukan terwujudnya hak-hak dasar masyarakat seperti sandang, perumahan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan hak-hak sadar lainnya. Pembangunan merupakan suatu kekuatan baru yang menembus masyarakat sehingga diharapkan dapat mengubah nasib jutaan orang miskin dan terbelakang.

Tidak hanya itu, Michael Todaro (1983), mendefinisikan sebagai “suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan signifikan dalam struktur sosial, sikap manusia, dan lembaga-lembaga nasional,

serta mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan menghapuskan kemiskinan absolut”.

Konsep Revitalisasi Pembangunan

Tujuan revitalisasi adalah untuk menghidupkan kembali kawasan yang mati, meningkatkan vitalitas kawasan, dan menghadirkan sesuatu yang baru pada kawasan (kegiatan dan bangunan) (Danisworo, 2000). Selain itu, proses pembaruan tidak cuma sekedar membangun atau melindungi suatu daerah, namun bertujuan agar merevitalisasi dan meningkatkan daerah yang sudah melemah fungsinya (Kimpraswil, 2003).

Proses revitalisasi suatu kawasan meliputi perbaikan aspek material, ekonomi dan sosial. Regenerasi merupakan upaya perencanaan kota dan upaya menjaga lingkungan binaan yang berkelanjutan dan dapat memperbaiki kondisi fisik kota, termasuk ruang publik, namun tidak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan peningkatan dan penguatan kegiatan ekonomi yang aspek sosialnya dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi lingkungan.

Salah satu aspek fisik yang terkena dampak revitalisasi adalah tata guna lahan, yaitu alokasi kegiatan pertanian dan kawasan untuk mencapai arah pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya sesuai dengan kecakapan alam, manusia, dan buatan (Chamdany, 2004). Visi kebangkitan diri Laretna (2002) tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kecantikan fisik saja, namun harus diselesaikan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat dan budaya yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, seperti yang dikemukakan Sugiyono (2013) mengatakan

bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado
2. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado
3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado
4. Seksi Drainase dan Saluran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado
5. Kepala Subbagian Program dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado

Adapun yang menjadi fokus penelitian yang terkait dengan perencanaan infrastruktur drainase Kota Manado dengan menggunakan 4 langkah

1. Diagnosis masalah
2. Perumusan tujuan
3. Analisis kelayakan
4. Evaluasi

Hasil dan Pembahasan

Diagnosis masalah

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu pekerjaan yang terencana dan sistematis, baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang melibatkan seluruh komponen, memperbaiki ruang dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif, efisien dan bertanggung jawab. Investasi pembangunan yang sistematis dan terencana merupakan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis yang disesuaikan dengan ketersediaan

sumber daya, keunggulan komparatif, potensi dan tantangan

Implementasinya merupakan suatu catatan keberhasilan pembangunan, dimana hasil pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. Disisi lain terdapat permasalahan pembangunan dimana terdapat kesenjangan antara hasil kerja pembangunan dengan tujuan pembangunan yang direncanakan. Permasalahan pembangunan antara lain berasal dari kelemahan yang belum diperbaiki, tantangan yang tidak terduga, dan sumber daya yang tidak optimal.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus mendapat perhatian serius terutama dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya terhadap entitas (daerah dan masyarakat) diperkirakan akan menjadi penting di kemudian hari. Keadaan atau peristiwa yang menjadi permasalahan strategis adalah keadaan yang tanpa disadari dan tidak diduga menimbulkan kerugian yang besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan membuka peluang peningkatan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Permasalahan pertanyaan strategis ditandai dengan kondisi atau permasalahan yang penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat institusional/organisasi, dan menentukan tujuan masa depan.

Pembangunan infrastruktur perkotaan harus bertujuan untuk memberikan pelayanan dasar, revitalisasi perekonomian dan pemererat hubungan, dengan memperhatikan estetika kota dan memperhatikan perencanaan wilayah. Meskipun menunjukkan perkembangan yang pesat, namun kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Manado masih perlu ditingkatkan dari segi pemerataan, efisiensi dan estetika

Berdasarkan data, cakupan pelayanan dasar terkait kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, dan angkutan umum belum menjangkau seluruh

masyarakat. Saluran drainase juga harus turut diperhatikan, karena kinerjanya tidak sesuai dengan kondisi awal, sehingga pada saat hujan deras ketidakmampuan saluran drainase mengalirkan kelebihan air menyebabkan terjadinya banjir pada wilayah yang pada akhirnya mengganggu kenyamanan dan mobilitas, dan bahkan menimbulkan kerugian materil akibat terendahnya perumahan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur drainase harus diarahkan pada pencegahan terjadinya genangan karena setiap terjadi genangan akibat tidak berfungsinya saluran drainase akan menyebabkan kerugian ekonomi.

Perumusan tujuan

Berdasarkan pernyataan visi dan misi serta berkaitan dan RPJMD 2021-2026, sasaran-sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada 5 (lima) tahun yang akan datang. bidang pembangunan infrastruktur dijabarkan ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi dan pedoman politik kemudian dikonkritkan ke dalam rangkaian program/kegiatan prioritas yang diselenggarakan dan tersusun secara sistematis untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah dari sudut pandang kesejahteraan manusia

Percepatan pertumbuhan Kota Manado dan pemerataan perekonomian/kesejahteraan harus didukung oleh pembangunan infrastruktur berkualitas yang dirancang sesuai fungsi daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas jalan, saluran pembuangan (drainase), trotoar dan ruang terbuka, perluasan hubungan sebagai salah

satu upaya untuk mengurangi kesenjangan antar daerah

Kebutuhan masyarakat Kota Manado terhadap infrastruktur dasar yang memadai relatif tinggi. Berdasarkan analisis usulan musrenbang kelurahan tahun 2018, dari 444 usulan yang masuk, 238 usulan merupakan usulan terkait kebutuhan infrastruktur, atau 53,6% merupakan usulan infrastruktur. Jika dipecah lagi, diketahui bahwa dalam rencana pembangunan desa, usulan terkait kebutuhan drainase (baik untuk pembangunan baru maupun revitalisasi) mendominasi usulan rencana pembangunan dengan jumlah 96 usulan (21,6% dari usulan musrenbang kelurahan)

Berdasarkan data yang sudah diperoleh bahwa tersedianya sistem drainase perkotaan yang dapat diandalkan, serta kondisi drainase eksisting yang sebagian besar dalam kondisi yang kurang baik, menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, setidaknya terdapat 50 lokasi titik genangan dengan luas genangan 572 ha, yang disebabkan utamanya oleh sumbatan sampah pada saluran air. Saat ini telah terbangun drainase sepanjang 1.086,53 km (tanpa melihat kondisi drainase), dan berdasarkan analisa dibutuhkan drainase sepanjang 1.448,7 km.

Fenomena akan kerusakan-kerusakan ini akhirnya berakibat pada semakin banyaknya peristiwa bencana alam seperti tanah longsor dan banjir yang disebabkan oleh luapan anak sungai juga kondisi drainase yang kurang baik.

Analisis kelayakan

Ujung dari kebijakan adalah perwujudan dari rencana yang menjadi arahan bagi pemerintah daerah untuk memutuskan fokus pembangunan guna optimalisasi pencapaian tujuan. Perwujudan

tersebut dituangkan dalam bentuk tingkat pembangunan semasa 5 (lima) tahun agar mencapai tujuan RPJMD secara berjenjang dan setiap tahunnya memiliki keterkaitan erat yang dapat dijelaskan.

Sebagai informasi dalam masa penyusunan dokumen RPJMD ini, APBD 2021 sudah berjalan sampai triwulan kedua, demikian juga dokumen rancangan RKPD telah selesai disusun, oleh karena itu untuk anggaran belanja APBD tahun 2021 menggunakan data eksisting dari dokumen APBD 2021, dan proyeksi anggaran pada tahun 2022 disesuaikan dengan hasil inputan dalam SIPD pada tahapan rancangan akhir RKPD 2022.

Perencanaan program prioritas dalam RPJMD yang disusun selanjutnya akan dijadikan landasan dalam penyusunan kebijakan Bappeda Kota Manado dan sebagai acuan utama dalam penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun.

Pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan terencana sejalan dengan perencanaan penggunaan lahan dalam konsep pembangunan berkepanjangan, semua hanya bisa terwujud jika pemerintah daerah mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sesuai aturan yang berlaku Lembaga pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan transparan pun merupakan ciri dari peradaban yang tinggi

Evaluasi

Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kualitas layanan infrastruktur, pemerintah daerah menggunakan beberapa indikator – indikator kinerja dalam melaksanakan pembangunan, demikian indikator kinerja yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pemerintah daerah wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Dengan demikian, perlu adanya kajian kembali yang dilakukan untuk dapat mengevaluasi atas efektivitas kebijakan, rencana dan program yang sudah dilaksanakan terkait dengan perencanaan pembangunan, sehingga dapat diketahui mana yang benar-benar memberi manfaat dalam rangka mendukung

Statistik merupakan salah satu urusan penting karena berkaitan pengevaluasian dengan pengelolaan data statistik yang dibutuhkan, disamping data-data lain dari sumber yang dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan seperti data-data capaian indikator, data yang tersedia juga dipakai untuk memproyeksikan target-target pembangunan yang hendak dicapai pada akhir periode masa Kepala Daerah (Walikota dan Wakil Walikota). Sehingga statistik sangat dibutuhkan untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan daerah

Statistik sebagai acuan utama dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program-program pemerintah serta kemajuan suatu wilayah. Jika dikaitkan dengan hasil evaluasi data terbaru dalam tahun 2021 menyebutkan bahwa persentase organisasi pemerintah daerah (OPD) yang menggunakan data statistik sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah hanya sebesar 20%. Pengelolaan data statistik pembangunan daerah tersebut masih

belum optimal sehingga mempengaruhi kualitas perencanaan.

Penutup

Kesimpulan

Perencanaan revitalisasi infrastruktur drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal, hal ini bisa dilihat dari:

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel hingga saat ini belum tercapai melalui pemerintahan yang ambisius, partisipatif dan transparan. Kemudian, belum tersedianya sistem drainase perkotaan yang dapat diandalkan, serta kondisi drainase eksisting yang sebagian besar dalam kondisi yang kurang baik, menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, dimana hingga saat ini juga masih memerlukan pengembangan dan perbaikan karena masih seringnya terjadi banjir dan genangan air di sekitar wilayah Kota Manado;
2. Masalah utama terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang perencanaan adalah masih lemahnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang ditandai dengan keselarasan dokumen perencanaan dengan penganggaran yang masih kurang, tingkat realisasi usulan musrenbang yang belum tinggi, serta indikator pembangunan daerah yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan;
3. Dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur drainase Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, instansi pelaksana program melibatkan kelompok masyarakat (rembung) dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur agar menunjang kebutuhan masyarakat setempat;

4. Belum adanya kesadaran masyarakat yang tinggal di bantaran sungai tentang aturan garis sempadan sungai dan aturan larangan membuang sampah, kurangnya kesadaran masyarakat ini dalam memperhatikan kebersihan lingkungan dan lemahnya penegakan peraturan daerah hal ini juga didukung dimana masih ada budaya sering membuang sampah sembarangan sehingga merambat ke saluran pembuangan yang berakhir pada sungai besar

Saran

1. Dibutuhkan sinergitas yang kuat antara tingkat pemerintahan dan para pemangku kepentingan. Sinkronisasi kebijakan pembangunan dari pusat hingga ke daerah menjadi pijakan strategis untuk menghadirkan pembangunan yang terarah dan saling melengkapi.
2. Perlunya konektivitas pengadaan sarana dan prasarana dalam bentuk perencanaan drainase, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keselarasan dokumen perencanaan wilayah di Kota Manado saling terhubung yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan realisasi usulan musrembang serta meningkatkan efisiensi arus air yang akan berujung pada hulu sungai
3. Perlu adanya penindak lanjutan dalam melibatkan kelompok sosial masyarakat (Musrembang) ini agar bukan hanya sekedar akan melibatkan kelompok sosial masyarakat saja dalam arti masih rencana saja. Supaya pelaksanaan pengembangan infrastruktur drainase ini dapat berjalan dengan baik dan akan menghasilkan kualitas perencanaan yang dapat efektif dan efisien
4. Pentingnya kesadaran masyarakat yang tinggal di bantaran sungai akan saluran drainase, karena kesadaran masyarakat dan kemandirian dalam menjaga lingkungan dapat menimbulkan minimnya resiko banjir dan bencana serta penguatan peraturan daerah tentang tata ruang

Daftar Pustaka

- Amalia, H. 2021. Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12 (1): 18-24.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Manado. 2022. Data Statistik Daerah Kota Manado. Kota Manado.
- Bulele, Y, Pangkey, M., dan Rompas, W. 2015. Efektifitas Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Bitunurus Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(10): 8-10. <http://www.unsrat.ac.id>
- Fatimah, S. 2020. *Teori Perencanaan*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Idris, I. "Proyek infrastruktur di Kota Manado terhambat" *Idntimes*, 18 Mei 2020, <https://sulsel.idntimes.com>
- Kaming, P. F., dan Raharjo, F. 2017. Komparasi Kecukupan Infrastruktur. *Rekayasa Sipil*. 6 (1): 10-11.
- Kemendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- Lufira, R, D., dan Asri, Caesaria. 2021. *Pengelola Drainase Kota*

- Berkelanjutan*. Malang, Jawa Timur: UB Press
- Mahi, A. K., dan Trigurnaso, S. I. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Metuak, N., Nayoan, H., dan Sumampow, I. 2022. Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado). *Jurnal Governance 2* (2): 4-8
- Muhammad, R. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Studi Kasus: Desa Pangkalan Rekan Muara Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas. *Doctoral dissertation*,
- Nain, U. 2018. *Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik*. Yogyakarta: Insistpress.
- Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Tahun 2016-2021.
- Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Perda Kota Manado No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026
- Perda Kota Manado No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026
- Perpres No. 15 Tahun 2015 tentang Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Perwal Kota Manado No. 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Manado Tipe B. Pemerintah Kota Manado.
- Poluan, K. K., Pangkey, M. S., dan Tampi, B. G. 2019. Dampak Pembangunan Infrastruktur Desa Pisa Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (74), 6-7. <http://www.unsrat.ac.id>
- Purbawijaya, I. B. 2011. Manajemen Risiko Penanganan Banjir Pada Sistem. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 15 (1): 77-79.
- Rumpia, G., Kiyai, B., dan Kolondam, H. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. *Jurnal Administrasi Publik* 5 (74) 6-7. <http://www.unsrat.ac.id>
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Witopanoel. "Visi Misi Kementrian Pekerjaan Umum". 24 November 2011, via Witopanoel. <https://witopanoel.wordpress.com>
- Wuri, C. D., Pangkey, M. S., dan Kolondam, H. F. 2018. Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Efektivitas. *Jurnal Administrasi Publik* 4 (62): 5-8. <http://www.unsrat.ac.id>